

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH DI DESA
BONTOSUNGGU KECAMATAN GALESONG
UTARA KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diusulkan oleh

ASRUL

Nomor Stambuk : 105610408511



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH DI DESA
BONTOSUNGGU KECAMATAN GALESONG
UTARA KABUPATEN TAKALAR**



Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Asrul

Nomor Stambuk : 105610408511

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I


Dr. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II



Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

ketua jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1113/FSP/A. 1-VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassa pada hari Senin tanggal 14 Bulan agustus 2017



Penguji

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (ketua)
2. Dr. Anwar Parewangi, M.Si
3. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Asrul

Nomor Stambuk : 105610408511

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dan bukan bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun pencabut gelar akademik.

Makassar, April 2017

Yang Menyatakan,

Asrul

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN DESA PESISIR TANGGUH DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Si selaku pembimbing I dan bapak Samsir Rahim, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Drs. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini selalu membantu saya dalam

pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
5. Kedua Orang Tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil. Semoga pengorbanan beliau memperoleh ridho dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada segenap jajaran pengurus dan anggota UKM SEPAKBOLA UNISMUH MAKASSAR, yang tiada hentinya memberikan dukungan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian studi.

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak membutuhkan.

Takalar, April 2017
Penulis

Asrul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemberdayaan.....	13
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	16
C. Konsep Pengembangan.....	20
D. Konsep Wilayah Pesisir.....	22
E. Tantangan Dalam Pemberdayaan.....	31
F. Kendala Dalam Pemberdayaan	31
G. Kerangka Pikir	36
H. Fokus Penelitian.....	38
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Pemberdayaan masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir tangguh di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.....	57
C. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berniatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering didengungkan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya masyarakat nelayan, pembudi daya bibit udang, pengepul, pengusaha rajungan kepiting.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/permen-kep/2014 Tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menegaskan bahwa Kementerian dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, Kementerian dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usahamasyarakat dalam PWP-3-K melalui : a) peningkatan kapasitas, b) pemberian akses teknologi dan informasi, c) permodalan, d) infrastruktur, e) jaminan pasar, dan f) aset ekonomi produktif lainnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi

dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Kondisi masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri seperti kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia (SDM), karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar dan kapasitas berorganisasi masyarakat.

Masalah kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan merupakan hasil dari beberapa faktor antara lain: pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya produktivitas. Salim (1984) menyatakan kemiskinan melekat atas diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjatuh dalam lingkaran kemiskinan tanpa ujung dan pangkalnya. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan kausalitas yang artinya rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan tingginya kemiskinan. Tingkat investasi perkapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik perkapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga hal itu dapat membentuk sebuah lingkaran kemiskinan

sebagai bentuk adanya sebuah hubungan sebab dan akibat. Rendahnya faktor-faktor di atas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, pada urutannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan. Miskin secara Etimologi memiliki arti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), kemiskinan adalah hal miskin, keadaan miskin. Dalam pengkajian terhadap kemiskinan didapati beberapa terminology yang sering digunakan. Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk kemiskinan yaitu: a) Kemiskinan Relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh policy yang belum mampu merengkuh seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. b) Kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan mendasar minimum diartikan sebagai ukuran keuangan dalam bentuk uang dan nilainya dinamakan dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan/ pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. c) Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan disebabkan kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena tatanan itu bukan hanya menjadikan namun juga melanggengkan kemiskinan. Dapat diartikan juga bahwa kemiskinan structural artinya struktur yang membuat orang menjadi miskin,

dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan akses secara baik. d) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang merujuk pada persoalan sikap karena budaya. Kemiskinan kultural diakibatkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu dengan ditunjukkan adanya kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut sebaiknya bisa direduksi atau secara gradual dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menjadi pembatas dalam melakukan perubahan-perubahan kearah tingkat kehidupan yang lebih baik. e) Kemiskinan Natural merupakan kemiskinan dimana secara alamiah tidak dapat mendukung kesejahteraan, seperti cacat fisik, cacat mental, usia lanjut, dan keterbatasan sumber daya alam. Kemiskinan ini dialami oleh seorang yang sejak lahir mengalami cacat tubuh, tak punya kaki atau tangan, tak punya akal sehat, juga orang-orang yang punya sifat prevert, mengurung diri, individual, sehingga membuat mereka tak bisa mengembangkan diri, menginginkan kemajuan.

Kemiskinan adalah masalah yang paling mendasar yang saat ini dialami oleh masyarakat, Perlunya dituntut peran pemerintah selaku pemberi bantuan modal dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna untuk menunjang pengembangan yang merujuk pada pembangunan daerah pesisir di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dengan memperhatikan masih berlangsungnya masalah-masalah sosial di wilayah pesisir, seperti kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah, kemiskinan dan kesenjangan, keterbelakangan, dan kerusakan ekosistem pesisir laut, serta pada

sisi lain ada upaya untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Peneliti melihat masih kurang atau minimnya peran pemerintah dalam pengembangan daerah pesisir tersebut, khususnya dalam pemberian penyuluhan kepada masyarakat, minimnya bantuan dana berupa perbaikan infrastruktur serta modal untuk meningkatkan pendapatan, tidak terlepas dari itu peran pemerintah sangat di perlukan dalam pengembangan potensi sumber daya manusia, adapun program pemerintah tersebut akan berjalan sesuai yang di harapkan ketika tidak terlepas dari partisipasi masyarakat guna mensukseskan pembangunan Daerah pesisir.

Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, maka pengelolaan sumberdaya ikan harus di lakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Pemerataan dimaksud adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi ; 1) hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; 2) hak untuk memperoleh perlindungan hukum; 3) hak untuk memperoleh rasa aman; 4) hak untuk memperoleh akses akan kebutuhan hidup yang terjangkau; dan 5) hak untuk memperoleh keadilan. Tanpa pemenuhan hak dasar tersebut, akan sulit di terapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan.

Pengembangan daerah pesisir, harus di kelola dengan sistem berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum tanpa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat pesisir dengan memperhatikan tingkat kesadaran dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pengembangan daerah pesisir merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk memberi pelayanan ataupun bantuan. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai aktor utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut untuk mengembangkan daerahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 telah menegaskan bahwa kontruksi negara kepulauan dengan wilayah laut terluas di dunia beserta potensi sumber daya alam yang di kandungnya merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat strategis. Pengelolaan atas sumber daya kelautan merupakan tumpuan masa depan bangsa yang memerlukan dukungan politik dan pemihakan nyata dari seluruh stakeholders. Undang-undang ini juga merekomendasikan bahwa pengembangan setiap wilayah sebagai satuan pembangunan agar memperhatikan peluang dan potensi keunggulan potensi sumber daya darat dan laut, berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Pelaksanaan pengembangan wilayah di lakukan secara terencana dan terintegrasi antar sektor pembangunan dan upaya pemerintah dalam pengembangan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dinamis. Di berbagai daerah, termasuk pada kawasan pesisir Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

merupakan kawasan pesisir yang sangat strategis, namun dalam pengelolaannya saling tumpang tindih antara kebijakan pemerintah, kerusakan sumber daya, dan ketidak mampuan daya dukung lahan untuk menopang aktivitas di kawasan tersebut. Untuk itu di harapkan adanya perhatian dari pemerintah selaku pengelola dan pemberi modal terhadap perkembangan daerah pesisir untuk menjadi daerah tangguh dan berkemajuan sesuai yang di harapkan bersama.

Dahuri (2004:5-6), ada enam alasan utama mengapa sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang besar untuk di bangun. 1) Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar, maupun diversitasnya. 2) Indonesia memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana di cerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya. 3) usaha di sektor kelautan dan perikanan tangkap memiliki keterkaitan yang kuat dengan usaha-usaha lainnya. 4) sumber daya di sektor kelautan dan perikanan merupakan sumber daya yang selalu dapat di perbarui sehingga bertahan dalam jangka panjang asalkan di sertai dengan pengelolaannya yang arif dan bijaksana terhadap lingkungan. 5) investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang relatif tinggi dan memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi pula. 6) pada umumnya usaha perikanan tangkap berbasis sumber daya lokal dengan input rupiah, namun demikian dapat menghasilkan output dalam bentuk dollar.

kawasan pesisir desa Bontosunggu dihuni oleh masyarakat dengan berbagai jenis profesi, seperti nelayan, pembibit udang, petani, pengusaha rajungan kepiting, pengepul ikan berskala besar (papalele). Nelayan, pembibit

udang dan petani adalah profesi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, selain terbatas pada akses permodalan, jaringan untuk memasarkan hasil dari yang mereka dapatkan juga terbatas karena kurangnya akses pemasaran. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, pengetahuan mereka hanya terbatas dari apa yang mereka pernah jalani dan dari apa yang mereka dengar di kesehariannya saja.

Pendidikan merupakan hak semua manusia. Tetapi tidak semua manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Masyarakat pada daerah pesisir umumnya memiliki kualitas pendidikan yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan masyarakat di daerah pusat kota. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain sarana prasarana serta kultur daerahnya. Kultur daerah pesisir yang hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai nelayan akan berakibat pendidikan yang berbasis pada laut. Semua hal dalam pendidikan akan dititik beratkan pada eksplorasi laut untuk kehidupan. Sudah menjadi rahasia umum apabila pengelolaan sumber daya laut kita jauh dari sempurna. Semua yang terkandung dalam laut kita di eksplorasi besar-besaran tanpa ada proses pelestarian yang baik. Hal itu disebabkan oleh pendidikan yang terkesan “sembarangan” untuk masyarakat pesisir. Pada daerah-daerah terpencil, misalnya daerah pesisir utara takalar, pelayanan pendidikan dirasa masih sangat kurang dan perlu mendapat perhatian. Hal ini berakibat pada kurangnya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sebagian besar pendirian lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang diprakasai oleh masyarakat masih berorientasi pada daerah perkotaan, sehingga perlu alternatif layanan pendidikan khususnya

bagi masyarakat kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, daerah sulit, dan terpencil).

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Bontosunggu sebagai indikator rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berpengaruh pada pemanfaatan teknologi dalam berusaha. Masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung menggunakan alat berteknologi rendah dan tidak berkembang, akibatnya pendapatan yang di peroleh sangat minim.

Berbagai persoalan ekonomi membelit kemajuan di desa Bontosunggu. Kelompok-kelompok sosial pada masyarakat pesisir yang rentan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dan kemiskinan adalah nelayan buruh, nelayan-nelayan tradisional seperti, nelayan ikan eceran, nelayan kepiting. Hanya sebagian kecil dari masyarakat pesisir, seperti pedagang ikan berskala besar, pemilik perahu besar, tengkulak (*papalele*), dan penyedia kredit informal yang diuntungkan oleh perkembangan desa pesisir selama ini. Bagian pesisir desa Bontosunggu yang perekonomiannya di topang oleh kegiatan penangkapan, peran ekonomi nelayan sangat menentukan intensitas dan dinamika perekonomian desa. Karena itu keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan akan menghambat mobilitas kerja dan perkembangan perekonomian sosial-ekonomi wilayah pesisir, disinilah dituntut upaya pemerintah dalam pengembangan daerah pesisir melalui pemberian permodalan.

Kawasan pesisir desa Bontosunggu memiliki persoalan pembangunan yang kompleks dan upaya untuk mengatasinya tidak dapat hanya di serahkan penanganannya kepada satu pihak. Persoalan-persoalan yang lain seperti

pembangunan prasarana jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan instalasi air bersih, dan pengembangan pertanian lahan pesisir, menjadi tugas pemerintah sebagai pelopor pembangunan daerah pesisir Desa Bontosunggu. Pada dasarnya wilayah pesisir Desa Bontosunggu menyediakan sejumlah peluang berkiprah bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam pembangunan masyarakatnya. Karena itu, pembangunan kawasan dan masyarakat pesisir desa Bontosunggu tidak dapat hanya di tangani oleh salah satu dinas/instansi/lembaga.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu ;

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir desa Bontosunggu ?

2. Kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir desa Bontosunggu ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir yang ada di desa Bontosunggu.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir desa Bontosunggu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir disamping bagi penulis sendiri, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi referensi keilmuan dan langkah awal untuk mengkaji suatu konsep tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal ini program pengembangan desa pesisir tangguh di desa Bontosunggu.
2. Bagi pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberi input dan kontribusi yang berharga bagi Pemerintah kabupaten takalar terkhusus pemerintah desa Bontosunggu mengefisienkan program pemberdayaan masyarakat pesisir di desa Bontosunggu.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini akan membuka cakrawala masyarakat luas, khususnya masyarakat pesisir tentang pemberdayaan. Melalui penelitian ini

masyarakat menjadi familiar dengan berbagai persoalan yang muncul dalam pemberdayaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan

Menurut Ketaren (2008: 178-183) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penayadaran, pada tahap penayadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penayadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menayadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi, dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "power" dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

a) Learning by doing, artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan-tindakan kongkrit yang terus menerus, yang dampaknya dapat terlihat. b) Problem solving, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat c) Evaluation, yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. d) Self-development and coordination, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas. e) Self-selection, satu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan. f) Self-decision, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan akan terjadi proses menggelinding dengan sendirinya. (Hurairah 2004)

Menurut Ife dan Tesoriero (2008 : 510), “pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Definisi ini terlihat jelas bahwa pemberdayaan bukan sekedar menolong orang miskin agar menjadi tidak miskin. Pengertian pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain. Suharto (2006 : 58) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom)
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil

pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garisbesar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek. (Suparjan dan Hempri, 2003: 44)

B. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam arena segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "Empowerment" yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi

terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegitimasi dan memperkuat segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejateraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM, gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, kewenangan dunia industri, gerakan moral, yang bermaksud memberikan moral kepada kekuatan (*force*) yang menjadi andalan hubungan sosial dan tiga dekade terakhir. Upaya pemberdayaan rakyat mencakup tiga-P yaitu, 1) pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat, 2) penyuluhan dapat merespon dan

memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan 3) pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Menurut Priyono dan Pranaka (1996:105-106) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial

(sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dalam upaya memberdayakan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menurut kartasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. Artinya,

tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Strategi pemberdayaan masyarakat digunakan dalam pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People Centered Development*). Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan.

C. Konsep pengembangan

Pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mngembangka suatu dasar yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-

kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkanmeningkatkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri.

Handoko (2001) pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan.

Menurut Adrianto (2004) strategi pengembangan untuk mencapai tujuannya adalah:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan memperkuat keterkaitan ekonomi desa dan kota melalui pengembangan kegiatan yang bertumpu pada jaringan kerja kelompok untuk memperlancar pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan, produksi dan pemasarannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, akses permodalan, manajemen dan teknologi bagi usaha perikanan melalui pelatihan, pendampingan manajemen dan teknologi terhadap kelompok masyarakat pemanfaat maupun lembaga sosial ekonomi masyarakat lainnya.
- 3) Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat, karena dengan demikian akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi.
- 4) Mengembangkan jaringan usaha kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat ditingkat lokal yang dapat menjamin kesinambungan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Konsep wilayah pesisir

Wilayah pesisir adalah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik yang kering maupun yang terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan bagian yang menuju arah laut wilayah pesisir adalah mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti dimentasi dan aliran air tawar atau aktifitas manusia di darat misalnya pencemaran dan penggundulan hutan (Sugiarto, 2005: 163).

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.

Menurut Hafid (2006: 174) bahwa di wilayah pesisir terdapat sekurang-kurangnya dua bentuk ekosistem, yaitu: 1) ekosistem alamiah meliputi terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, laguna, delia dan lain-lain; 2) ekosistem buatan meliputi tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, agroindustri, permukiman dan lain-lain. Sedangkan menurut Amiruddin A. Dajaan Imami (2006: 457) bahwa kawasan pesisir adalah zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh laut ke arah darat, dan batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut

Desa pantai atau yang dipersamakan dengan istilah pesisir, oleh Sugiarto (2005:4) menyatakan bahwa batasan desa pantai adalah wilayahnya berbatasan dengan daerah pantai, penduduknya padat, sebahagian besar profesinya sebagai nelayan dan pengelolah ikan, sistim perekonomian wilayahnya didominasi oleh sektor basis dengan kegiatan utama berupa penangkapan ikan dan industri pengelolaan hasil laut.

Masyarakat pesisir, umumnya dikenal sebagai masyarakat nelayan (penghasil ikan) baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kelompok masyarakat nelayan dalam skala besar adalah mereka yang melakukan pembudidayaan ikan yang umumnya di tambak, sedangkan kelompok yang berskala kecil adalah mereka yang dalam menghasilkan ikan atau yang dipersamakan dengan itu sangat bergantung pada penangkapan langsung dilaut. Meski kedua kelompok masyarakat pesisir tersebut sama-sama sebagai penghasil ikan atau yang sejenis atau yang dipersamakan dengan itu, namun titik perbedaannya adalah terletak pada pola kerjanya. Strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu ;

- 1) penguatan akses mencakup akses hukum, akses informasi, dan akses ekonomi,
- 2) Penguatan hak yang mencakup: hak akses (*right of access*) kawasan wisata pesisir, hak pemanfaatan (*right of withdrawal*), dan hak pengelolaan (*right of management*),
- 3) Penguatan kelembagaan untuk menentukan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang

mencakup: nilai sosial, norma, organisasi (*players of the game*), kontrol(*control*), insentif, dan kebutuhan(*needs*).

Program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi faktual di wilayah pesisir adalah sebagai berikut: (a) program ekotourism, (b) nelayan, (c) budaya lokal, (d) keterampilan, (e) kerajinan rakyat, dan (f) teknologi tepat guna. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang dikatakan oleh Oakley dan Marsden dalam Priyono, (1996) diartikan sebagai suatu proses yang memiliki dua kecenderungan:

- a) Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan. Kekutan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pengembangan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan primer darimakna pemberdayaan.
- b) Kedua, atau kecenderungan sekunder, menekankan pada proses simulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sesungguhnya kedua proses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, seringkali harus memulai kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Berdasarkan tujuan dan (strategi) pemberdayaan masyarakat dirumuskan program-program nasional dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a) Program pengembangan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat setempat agar mampu menjadi wahana bagi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi, martabat dan keberadaan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik

b) Program pengembangan bantuan sosial keluarga miskin

Tujuan program ini adalah untuk menyediakan bantuan sosial seperti pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan keterampilan dan modal usaha kepada kelompok masyarakat untuk keluarga miskin dan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

c) Program pengembangan sistem jaminan sosial.

Tujuan program ini adalah untuk memberikan dukungan iklim dan mendorong terselenggaranya system jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat

d) Program pengembangan kelembagaan keswadayaan.

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan atau volunter berfungsi dalam penggalangan solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat luas untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan.

e) Program pengembangan kemandirian politik masyarakat

Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat dan informasi perkembangan politik .

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan kajian strategis yang berkesinambungan tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo, dan makro. Hal ini ditujukan agar masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa mengalami hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berubah struktur pemerintah regional setingkat kabupaten, kota dan provinsi. Sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat dan nasional (Hikmat : 2001).

Proses pemberdayaan (*empowerment*) ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dan mengontrol diri yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dan lingkungannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan sangat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Suatu kerjasama yang serasi dan seimbang dan

saling menguntungkan akan dapat menjaga kesinambungan dan kelanjutan sebuah program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan juga masyarakat dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara berbagai pihak dalam menyukseskan pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat maka kerjasama dapat terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan program pembangunan, yakni perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program tersebut. Selain itu, kedua belah pihak juga harus dapat bersama-sama menikmati hasil dari pelaksanaan program secara adil terutama bagi masyarakat kecil.

Dalam era otonomi daerah untuk lebih mendayagunakan potensi sumberdaya pesisir dan lautan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumberdaya kelautannya. Desentralisasi kewenangan sumberdaya pesisir kepada pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan asas-asas pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, baik pemerintah maupun masyarakat terlibat penuh, mulai dari proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengadilan.

Kusnadi, (2015) desentralisasi akan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan sebagai bentuk

tanggung jawab sosial terhadap masa depan sumberdaya tersebut, institusi lokal dan kearifan budaya lokal sebagai instrumen pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berbasis masyarakat. Hal ini merupakan modal sosial untuk pembangunan masyarakat lokal dan sebagai perlindungan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. Sinergi peran antar dimensi akan menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan, dinamika ekonomi pesisir, pengelolaan sumberdaya alam yang optimal, dan kelestarian lingkungan. Peran yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat bisa saja menjadi kompleks atau sederhana karena akan di tentukan oleh intensitas tantangan yang ada, karakteristik geografis, keragaman struktur sumberdaya ekonomi yang ada, serta kapasitas sumberdaya yang dimiliki para pelaku.

Karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir **mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyang** misalnya mereka untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka mereka menggunakan rasi bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah **laut**, namun dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan social pada umumnya, nelayan tergolong kasta rendah.

Husain, (2006) Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, bahkan mata pencaharian yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan mereka terabaikan dan tidak tergantikan oleh pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang dibangun masyarakat lebih sering tergusur, daripada diikutsertakan dalam proses pembangunan

Posisi masyarakat dan partisipasinya menjadi penting di perhitungkan dalam pengembangan wilayah pesisir dan lautan karena didasari oleh perspektif berikut ini. Pertama, partisipasi masyarakat pesisir merupakan instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Hal ini menekankan bahwa tanpa kehadiran mereka, program pembangunan yang akan di kembangkan, akan gagal. Kedua, masyarakat pesisir akan lebih mempercayai program yang dikembangkan dalam bidang yang terkait langsung dalam bidang mereka. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan hingga implementasi dan evaluasi akan membuat mereka mengetahui seluk-beluk program tersebut dan bahkan merasa memilikinya. Ketiga, kedua hal diatas akan mendorong terciptanya partisipasi secara umum masyarakat pesisir dalam pembangunan karena tercipta persepsi yang kondusif bahwa partisipasi mereka merupakan hak demokrasi untuk menunjang proses demokrasi itu sendiri.

Peluang pemberdayaan masyarakat pesisir :

- 1) Komponen primer, yakni komponen kegiatan/usaha yang terlibat langsung dengan pelayanan pengunjung seperti misalnya akomodasi, pelayanan makanan/minuman dan pengelolaan atraksi. Khusus mengenai pengusaha

akomodasi, berbicara pada skala komersial, komponen ini relatif membutuhkan investasi yang tinggi, jaringan pemasangan yang luas dan sistim pengelolaan yang profesional.

2) Komponen pendukung, yakni komponen kegiatan atau usaha yang menunjang penyelenggaraan pelayanan terhadap pengunjung, seperti misalnya hasil-hasil pertanian untuk konsumsi pengunjung, pembuatan cinderamata, pelayanan transport lokal.

Komponen ini apabila dikelola dengan baik dan benar, akan memberikan dampak ekonomi yang tinggi bagi masyarakat luas. Berdasarkan kedua komponen tersebut maka menyangkut kesempatan kerja bahwa dengan melalui pengembangan pariwisata akan terbuka sejumlah peluang kerja, tidak perlu dipertanyakan lagi. Lapangan kerja baru akan terbuka dengan bertumbuhnya komponen primer. Dan seiring dengan peningkatan kegiatan/ usaha komponen pendukung otomatis penyerapan tenaga kerja di sektor pendukung akan bertambah. (Moelyarto, 1999 : 37-38).

E. Tantangan dalam pemberdayaan

Tantangan di era globalisasi yaitu membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan lokal atas dasar kebutuhan setempat. Penguatan peranserta masyarakat pedagang kecil sebagai pelaku pembangunan, karena harus didorong seluas-luasnya melalui program-program pendampingan menuju suatu

kemandirian mereka. Disamping itu pula, perlu pengembangan organisasi, ekonomi jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan usaha pemberdayaan masyarakat yang demikian itu, mudah-mudahan dapat membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

F. kendala Dalam Pemberdayaan

Kemisikinan adalah penyebab terjadinya pemerosotan pendidikan, yang kemudian berakibat pada penurunan mutu sumberdaya manusia. Pada awalnya, sumber daya manusia adalah terjemahan dari kata “human resources”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “manpower” atau tenaga kerja. Bahkan ada beberapa pihak yang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya).

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa dan karsa).Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Meskipun kemajuan teknologi mencapai puncak tertinggi, perkembangan informasi yang semakin meluas dan tersedianya modal dan memadainya bahan, namun tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni, maka sebuah organisasi akan sulit mencapai tujuannya.

Weather dan Davis (1996), memberikan pengertian sumber daya manusia sebagai pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebagaimana dikemukakan, bahwa dimensi pokok sisi sumber daya

adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Definisi sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: intelligence, creativity dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi sumber daya manusia di atas, maka kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegang pada pengertian sumber daya manusia tersebut, maka istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). Salah satu masalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan pesisir adalah kekurangan modal sedangkan lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana menyalurkan modal kepada usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan realitas seperti ini, perlu terobosan yang bersifat merangsang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yaitu antara lain dengan pengembangan lembaga keuangan pedesaan. Pada era otonomi daerah perlu merubah cara pandang dalam pengelolaan sumberdaya modal untuk sebesar-besarnya dapat diakses oleh pelaku ekonomi di daerah sendiri. Modal sebagai faktor pelancar pembangunan ekonomi masyarakat saat ini masih menjadi salah

satu penghambat dalam peningkatan produktivitas nilai tambah di pedesaan pesisir. Untuk mendorong pembangunan pedesaan pesisir diperlukan model kelembagaan keuangan pedesaan yang khusus menunjang pembangunan dengan memobilisasi dana yang ada di pedesaan dan menyalurkan pinjaman untuk membiayai aktivitas ekonomi.

Masyarakat pesisir merupakan kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonomi penduduk bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Secara umum, sumberdaya perikanan (tangkap dan budidaya) merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan pesisir telah dilakukan, diantaranya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) menemukan program ini tidak selalu memberikan hasil yang positif, terutama dari sisi mekanisme pengelolaan program pelaksanaannya. Namun, program pemberdayaan ini memberikan dampak nyata pada peningkatan pendapatan masyarakat. Secara kelembagaan program ini memiliki kinerja yang baik, meliputi pengelolaan, peningkatan kapasitas, kemitraan dan pemangku kepentingan Masyarakat di pedesaan pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan, aktivitasnya mengikut musim dan memerlukan modal usaha yang relatif besar setiap kali melaut, menyebabkan modal yang mereka miliki selalu tidak mencukupi. Hasil yang mereka peroleh dari melaut, sebagian besar habis digunakan saat mereka sedang tidak mencari ikan, sehingga saat diperlukan, modal tidak lagi mencukupi, pemberdayaan akses permodalan nelayan dapat

melalui pembayaran proporsional sesuai musim ikan. Mereka menyarankan untuk membentuk kelembagaan ekonomi keuangan mikro “baru” yang lebih operasional dan mampu meningkatkan aksesibilitasnya terhadap perbankan di satu sisi, dan di sisi lain mampu meningkatkan aksesibilitas nelayan di dalam memenuhi kebutuhan permodalan dalam menjalankan usahanya. Di luar perbankan, golongan miskin dapat memperoleh layanan keuangan dari lembaga nonperbankan, lembaga nonformal, dan unit usaha keuangan mikro sebagai komponen program pembangunan pemerintah. Pelayanan utama yang disediakan lembaga-lembaga ini adalah kredit. Persoalannya adalah, kecuali pada pegadaian, adanya kecenderungan bahwa hanya golongan miskin yang memiliki usaha nonpertanian yang memiliki kemudahan mengakses kredit, karena usaha nonpertanian dinilai lebih berpotensi mengembalikan pinjaman. Model lembaga keuangan mikro mempunyai tugas utama menyalurkan pinjaman ke usaha mikro atau masyarakat berpendapatan rendah dan lingkungan yang kenal dengan lembaga pendanaan. Prakteknya, lembaga keuangan mikro memberikan layanan jasa keuangan dengan kepercayaan usaha berdasar pengembalian cicilan. Lembaga keuangan mikro merupakan suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Lembaga ini menjadi alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Lembaga keuangan

formal relatif lebih lambat perkembangannya dibandingkan dengan lembaga keuangan ilegal. Lembaga keuangan ilegal tumbuh sangat diminati masyarakat bawah. Akhirnya lembaga ini tumbuh subur dan mampu memenuhi kebutuhan dana di masyarakat dengan baik. Banyak penyaluran dana ekonomi produktif tidak tepat sasaran karena didistribusikan kepada pedagang yang tidak miskin. Mereka juga mendapati masyarakat pesisir tidak mampu untuk mengajukan pinjaman, dan jika meminjam umumnya tidak mampu untuk melunasi pinjaman. Model pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan yang didasarkan pada pemberdayaan lembaga ekonomi-keuangan mikro harus memperhatikan ketepatan waktu sesuai kebutuhan dan sasaran peminjam. Selain keterbatasan pada kelembagaan, kecenderungan masyarakat meminjam uang pada rentenir atau tengkulak adalah sebuah keterikatan yang seperti tinta sulit untuk dilepaskan, hal ini dilakukan karena sulitnya mendapat modal pinjaman dari lembaga keuangan.

G. Kerangka Pikir

Sumberdaya manusia yang terbatas pada rendahnya tingkat pendidikan adalah masalah besar, sehingga di perlukan terobosan-terobosan yang berbasis pengetahuan dan perlu adanya program pendidikan dari pemerintah untuk generasi-generasi baru agar kultur dapat di kombinasikan dengan pengetahuan agar penyakit sosial atau kesenjangan yang ada dalam masyarakat dapat di minimalisir atau bahkan dihilangkan. Kondisi sosial masyarakat yang relatif

terbuka di perlukan untuk membangkitkan semangat partisipasi dan tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir.

Dalam menghadapi kendala di tataran realitas dan mengefektifkan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan, maka pada masa otonomi daerah ini di perlukan solusi generik, yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Posisi masyarakat dan partisipasinya penting di perhitungkan dalam pembangunan wilayah pesisir dan lautan karena partisipasi masyarakat merupakan instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Mereka lebih mempercayai program yang dikembangkan dalam bidang yang terkait langsung dengan kepentingan mereka.

Masyarakat pesisir memiliki peluang yang sangat besar karena di dukung oleh sumberdaya yang banyak dan besar, untuk itu di perlukan keaktifan dari berbagai lembaga khususnya pemerintahan agar tantangan dalam pemberdayaan dapat di laksanakan.



Berikut gambar skema kerangka fikir;



G. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, maka perlu diuraikan fokus penelitian untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pemberian penyuluhan kepada masyarakat
- b. Pemberian bantuan berupa dana dan infrastruktur
- c. Peningkatan kualitas pendidikan.
- d. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

H. Deskripsi fokus penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka dalam penelitian ini perlu diuraikan defenisi fokus penelitian sebagai berikut:

- a. pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai tentang pentingnya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- b. Pemberian bantuan modal yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai modal untuk meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir.
- c. Peningkatan kualitas pendidikan adalah langkah utama yang harus ditempuh agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berdaya.
- d. sumberdaya manusia yang terbatas dan keterikatan masyarakat dengan tengkulak (papalele) dan rentenir adalah kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan mulai tanggal 26 februari sampai 26 april 2017, Penelitian ini berlokasi di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dalam program pengembangan daerah pesisir tangguh.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dalam program pengembangan daerah pesisir tangguh di desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

2. Tipe penelitian

Tipe yang di gunakan oleh penulis adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh informan.

C. Sumber data

Dalam penelitian ini setidaknya ada 2 sumber data yang dipergunakan, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, yaitu kepada orang-orang yang mengetahui lebih mendalam tentang topik penelitian secara akurat dan mampu mewakili kelompok dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di desa Bontosunggu.
2. Data sekunder dalam penelitian inia dalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan kepustakaan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir.

D. Informan Penelitian

Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam program pengembangan daerah pesisir tangguh, ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini informan yang dianggap bisa memberikan banyak data mengenai pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pegawai dari dinas perikanan dan kelautan, salah satu pegawai dari balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan, kepala desa Bontosunggu, KAUR keuangan desa Bontosunggu, sekretaris pembangunan desa Bontosunggu, tokoh pemuda desa bontosunggu, tokoh pendidikan desa Bontosunggu, serta dua kepala dusun yang ada di desa Bontosunggu yakni

dusun Tamasongo dan dusun kalongkong dan masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat di desa Bontosunggu.

Tabel 1. Tabel daftar informan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan	1
2.	Pegawai Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan	1
3.	Kepala Desa Bontosunggu	1
4.	KAUR Keungan Desa Bontosunggu	1
5.	Sekretaris Pembangunan Desa Bontosunggu	1
6.	Tokoh Pemuda Desa Bontosunggu	1
7.	Tokoh Pendidikan Desa Bontosunggu	1
8.	Kepala Dusun kalongkong	1
9.	Kepala dusun Tamasongo	1
10.	Kelompok masyarakat	3
	Jumlah Informan	

E. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi. Atau teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa secara langsung tentang pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada salah satu pegawai dari dinas perikanan dan kelautan, salah satu pegawai dari balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan, kepala desa Bontosunggu, KAUR keuangan desa Bontosunggu, sekretaris pembangunan desa Bontosunggu, tokoh pemuda desa bontosunggu, tokoh pendidikan desa Bontosunggu, serta dua kepala dusun yang ada di desa Bontosunggu yakni dusun Tamasongo dan dusun kalongkong.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu cara mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada

di tempat diselenggarakannya penelitian. Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan

2. Sajian Data

Sajian data merupakan satu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dan dipahami.

3. Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Pengabsahan Data

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan metode/teknik tertentu, diuji ketidakakuratan data yang didapat.

3. Triangulasi waktu yaitu berkenaan dengan waktu pengambilan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Profil Umum Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi $5^{\circ}3' - 5^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}22' - 119^{\circ}39'$ Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih $566,51 \text{ Km}^2$. Secara administrasi Kabupaten Takalar memiliki batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores

Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat

pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi dinas kelautan dan perikanan kabupaten takalar sebagai institusi dalam bidang kelautan dan perikanan dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan sangat ditentukan oleh kinerja dinas kelautan dan perikanan karena potensi sumber daya kelautan dan perikanan kabupaten takalar sangat potensial dengan panjang garis pantainya 75 km.

Perumusan visi organisasi diharapkann agar setiap anggota dalam organisasi tersebut memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar maka dirumuskan misi, misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar adalah merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mencapai visi organisasi. berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas dan Bermartabat
2. Meningkatkan Peran Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas, Adil dan Merata secara Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal.

Adapun strategi yang ditempuh untuk dapat mewujudkan visi misi dinas adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat pesisir;
- b. Pengembangan agribisnis dan agroindustri perikanan berbasis masyarakat dan potensi lokal diarahkan pada orientasi pasar dan disversifikasi produk;
- c. Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan penegakan hukum perusak lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Pengembangan networking antara pemerintah daerah, swasta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan penyajian informasi yang akurat dan bertanggungjawab.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dinas kelautan dan perikanan kabuapten takalar meliputi:

- a) Peningkatan produksi perikanan;
- b) Peningkatan pendapatan nelayan;
- c) Peningkatan ekspor hasil perikanan;

- d) Peningkatan konsumsi ikan;
- e) Penyerapan tenaga kerja;
- f) Peningkatan jumlah armada dan alat tangkap
- g) Peningkatan sarana dan prasarana.

2. Letak Geografis Desa Bontosunggu

Desa Bontosunggu merupakan salah satu desa di kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 4787 jiwa yang sebagian wilayahnya berupa kawasan pesisir. Secara administrasi berbatasan :

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampong Beru.
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamasaju.
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah pesisir, dan
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Mandalle kabupaten Gowa.

Luas wilayah desa Bontosunggu tercatat $12,25\text{Km}^2$ (17,68% terhadap luas kecamatan) yang terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Bontosunggu, dusun Kalongkong, dusun Maccini Sombala dan dusun Tamasongo. Dengan 10 RW/RK serta 20 RT. Jarak dari kecamatan Galesong Utara mencapai 3 km sedangkan jarak dari ibukota kabupaten Takalar mencapai 30 km yang melalui kecamatan galesong, Galesong Selatan, Kecamatan Bontonombo Selatan, dan kecamatan Sanrobone.

Desa Bontosunggu merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter dari permukaan laut. Potensi sumber daya alam desa Bontosunggu yaitu padi, jagung, ikan, kepiting, udang dan berbagai sumber laut lainnya.

3. Profil Pemerintahan Desa Bontosunggu

Desa Bontosunggu terdiri dari 4 (Empat) dusun, masing-masing kepala dusun di rekomendasikan oleh warga yang berada di dusun tersebut dan pengangkatannya di tentukan oleh kepala desa dengan masa jabatan 5 tahun.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa Bontosunggu dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh seorang sekretaris dan dua kepala urusan dan dua sekretaris pembantu.

Adapun kepala-kepala urusan tersebut adalah :

1. Kepala Urusan Keuangan
2. Kepala Urusan Umum
3. Sekretaris Pembangunan
4. Sekretaris Pemerintahan

Dalam pemerintahan terdapat berbagai tugas pokok dalam setiap bidang masing-masing. Adapun rincian tugas pokok/program kerja desa Bontosunggu antara lain sebagai berikut

Kepala Desa, yaitu :

- a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.
- b) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desa.

- c) Melaksanakan tugas pemerintah daerah.
- d) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e) Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa.
- f) Membagi tugas pada bawahan sesuai tugasnya dan member petunjuk pada bawahan secara lisan maupun melalui rapat staf dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan.
- g) Mengawasi tanah perkuburan agar tidak diambil alih oleh pihak lain.
- h) Membuat laporan mutasi tanah di wilayah desa.
- i) Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan guna menunjang pembangunan di daerah.
- j) Mengawasi pemungutan PBB oleh petugas pemungut guna tercapainya target penerimaan PBB.
- k) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.
- l) Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- m) Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa.

Sekretaris desa, yaitu :

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

- b) Memberikan pelaksanaan administrasi secara teknis disusun organisasi pemerintah desa.
- c) Menjalankan administrasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa
- d) Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan.
- e) Melaksanakan urusan keuangan
- f) Melaporkan situasi keamanan dan ketertiban penduduk dari semua urusan yang ada di wilayah kepala desa

Bidang pemerintahan, yaitu :

- a) Koordinasi dan melaksanakan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan pembinaan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).
- d) Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga ketahanan masyarakat desa.
- e) Penguatan sistem keamanan lingkungan.
- f) Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan
- g) Peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil/hansipdan satuan perlindungan masyarakat/linmas di desa dan kelurahan.
- h) Penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- i) Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya.

Bidang pembangunan, yaitu :

- a) Menyiapkan bahan penyusunan program kebijakan penyelenggaraan dusun hidup di desa Bontosunggu.
- b) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan perekonomian dan pembangunan desa Bontosunggu.
- c) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial kependudukan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan kesehatan masyarakat di desa Bontosunggu.

Bidang Umum, yaitu :

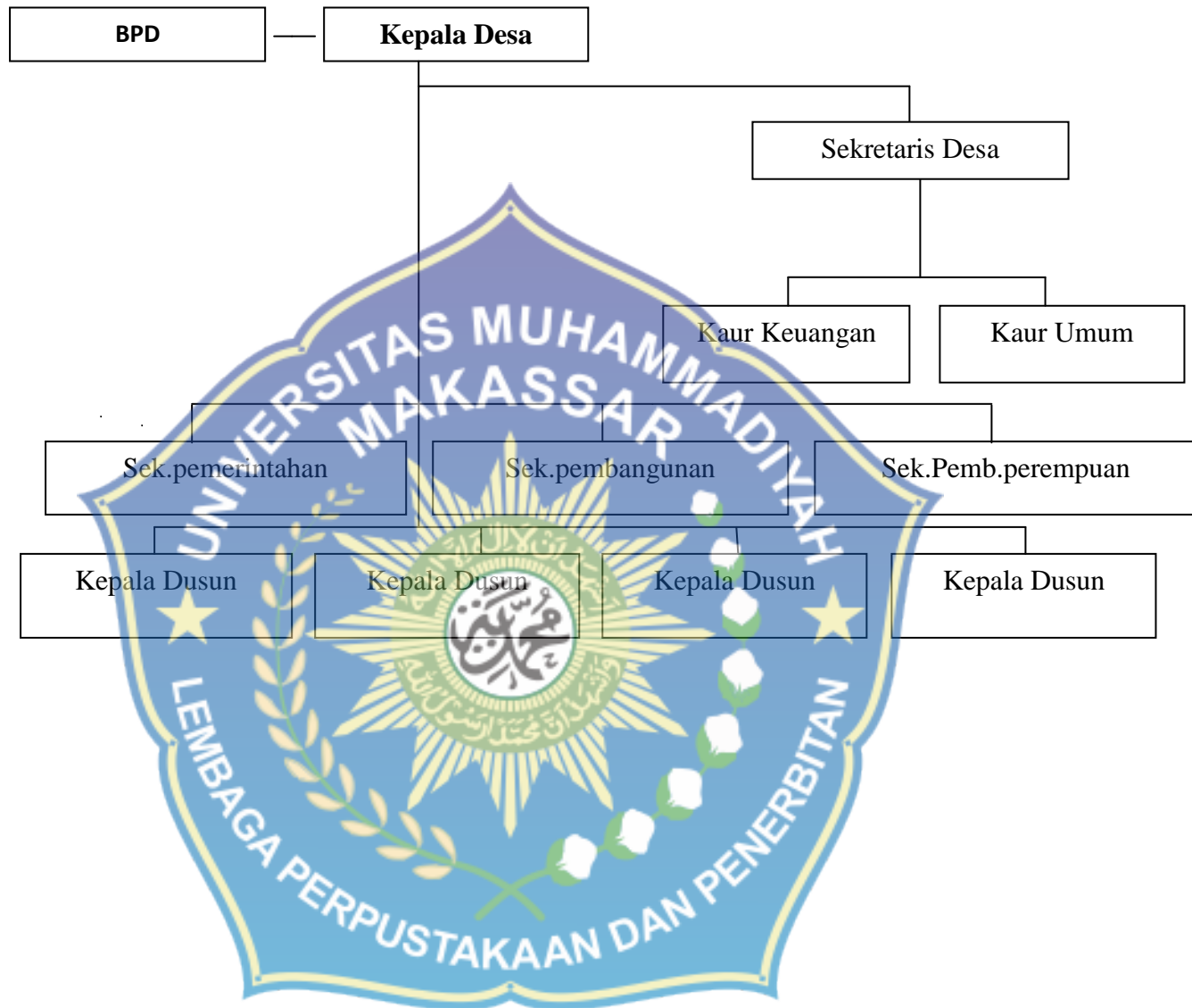
- a) Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan ketertiban umum guna menegakkan peraturan perundang-undangan di desa Bontosunggu
- b) Menyiapkan bahan pembinaan kependudukan, keluarga berencana, bahan bumi dan bangunan, catatan sipil dan bencana alam.
- c) Menyiapkan bahan pembinaan, kesatuan bangsa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lain di desa Bontosunggu
- d) Monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan.
- e) Menyusun rencana teknis sesuai bidang tugas masing-masing.

- f) Melakukan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian, pemberi pembinaan dan penerimaan sesuai tugasnya serta pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala desa.

Bidang Keuangan, yaitu :

- a) Menyapkan dana pembinaan, dalam penyelenggaraan program kegiatan desa Bontosunggu.
- b) Menyiapkan dana kegiatan penyusunan program dan bantuan sosial kepedudukan desa Bontosunggu.
- c) Menyiapkan dana penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan desa Bontosunggu.
- d) Menyiapkan dana untuk penguatan sistem keamanan lingkungan.
- e) Melaksanakan urusan keuangan.
- f) Mengevaluasi rincian dana yang telah dianggarkan untuk kegiatan tertentu.
- g) Melaporkan rincian dana keuangan yang telah dianggarkan pada wilayah desa Bontosunggu.

Adapun struktur pemerintahan desa Bontosunggu dapat dilihat pada bagan berikut.



4. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Bontosunggu berjumlah 4787 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk desa bontosunggu

No.	Dusun	Kk	Penduduk		L+P
			Laki-laki	perempuan	
1	Bontosunggu	379	655	651	1306
2	Maccini sombala	337	560	562	1122
3	Kalongkong	351	672	661	1333
4	Tamasongo	281	508	518	1026
	Jumlah	1348	2395	2392	4787

Sumber: Laporan Kependudukan April 2016 Desa Bontosunggu

Dari tabel 1 diketahui jumlah penduduk desa Bontosunggu paling sedikit terdapat di dusun Tamasongo yaitu berjumlah 1026 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 281 jiwa dari total jumlah penduduk desa Bontosunggu sebanyak 4.787 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling banyak terdapat di dusun Bontosunggu sebanyak 1306 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 379 jiwa.

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa bontosunggu beraneka ragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Mata pencaharian penduduk desa Bontosunggu

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	389
2	Petani	325
3	Pegawai Negeri	89
4	Buruh Swasta	289
5	Peternakan	296
6	Pedagang	69
	Jumlah	1457

Sumber : kecamatan Galesong Utara dalam angka 2016.

Dari tabel 2 diketahui bahwa mata pencaharian desa Bontosunggu yang paling dominan yaitu nelayan berjumlah 389 jiwa dan petani dengan jumlah 325 jiwa dari jumlah total penduduk yang bekerja sebanyak 1.457 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh swasta sebanyak 289 jiwa, bekerja sebagai pedagang sebanyak 69 jiwa, yang bekerja pada sector peternakan sebanyak 296 jiwa, sedangkan penduduk yang bermata pencaharian paling sedikit yaitu yang bekerja sebagai pegawai negeri (PNS dan Guru).

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan acuan kemajuan sebuah desa. Berikut tingkat pendidikan di desa Bontosunggu

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Desa Bontosunggu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	485
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	622
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	372
4.	Sarjana (S1)	33
5.	Pasca Sarjana (S2)	4
	Jumlah	1.516

Sumber : Kecamatan Galesong Utara dalam angka 2016

Dari tabel 3 diketahui bahwa tingkat pendidikan desa bontosunggu yaitu tingkat sekolah dasar (SD) berjumlah 485 jiwa, tingkat pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMP) berjumlah 622 jiwa, tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 372 jiwa, sedangkan tingkat pendidikan paling sedikit di desa Bontosunggu yaitu tingkat sarjana (S1) sebanyak 33 jiwa dan pasca sarjana (S2) sebanyak 4 jiwa dari jumlah total tingkat pendidikan sebanyak 1.516 jiwa.

B. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Bontosunggu

1. Pemberian penyuluhan

merupakan langkah utama yang ditempuh oleh pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan hidup. Pemberian penyuluhan diperlukan karena program pemberdayaan merupakan program yang ditujukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat menuju masyarakat yang lebih maju dan mandiri.

Penyuluhan yang disampaikan harus tepat guna dan tepat sasaran agar masyarakat bisa memahami apa itu penyuluhan dan peruntukannya untuk lingkungan masyarakat sendiri bagaimana, terkait dengan itu dituntut seluruh peran aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa guna memberikan suntikan moral kepada masyarakat pesisir, lewat penyuluhan tersebut masyarakat yang ada di desa Bontosunggu sudah bisa berperan aktif dan memberikan peran positifnya terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Keinginan untuk berubah menjadi lebih baik adalah cita-cita yang ingin dicapai setiap warga Negara, terkhusus masyarakat yang menghuni kawasan pesisir desa Bontosunggu. Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilaksanakan, masyarakat sangat bergantung kepada pemerintah untuk merubah keadaan mereka. Keinginan masyarakat untuk lebih baik di dukung oleh upaya pemerintah dengan memberikan fasilitas untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari.

Program ini harus tepat guna dan tepat sasaran agar masyarakat bisa memahami apa itu pemberdayaan untuk masyarakat, terkait dengan hal ini peran penyuluh sangat di butuhkan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah yang

terkait. Lewat penyuluh tersebut masyarakat bisa menyampaikan aspirasi terkait dengan apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan bisa menjaga serta melestarikan lingkungan dimana mereka menghasilkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya.

Sehingga tujuan pemerintah bisa berjalan sesuai yang diharapkan guna memberdayakan masyarakat pesisir yang ada di desa Bontosunggu kecamatan Galesong Utara kabupaten takalar. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh AB selaku pegawai dinas perikanan dan kelautan, bahwa :

“pemberian penyuluhan kepada masyarakat pesisir akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan penyuluhan masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya”. (wawancara SB, 26 februari 2017).

Pemberian penyuluhan kepada masyarakat pesisir memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di kawasan pesisir Bontosunggu. Peran balai penyuluh juga sangat penting terhadap kehidupan masyarakat, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah merekalah yang menjadi pemeran utama dalam meningkatkan kemampuan serta pengetahuan masyarakat pesisir tentang bagaimana masyarakat melangsungkan aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh PH selaku pegawai BP3K, bahwa:

“Pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan alat tangkap bagi nelayan, tentang bagaimana pemberian pakan yang baik terhadap bibit udang bagi pembudi daya bibit udang dan bagaimana mengolah daging kepiting serta bagaimana cara memasarkannya bagi pengusaha rajungan kepiting”. (wawancara PH, 26 februari 2017)

Lewat penyuluhan, masyarakat yang ada di desa Bontosunggu sadar akan bagaimana maksud dan tujuan penyuluhan itu sendiri sehingga masyarakat pesisir

dapat melangsungkan aktivitas dengan mudah, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh DS selaku kepala dusun Kalongkong, bahwa :

“penyuluhan kepada masyarakat sangat bermanfaat karena dari penyuluhan ini masyarakat dapat lebih mengetahui tentang bagaimana mereka menjalankan pekerjaannya” (wawancara DS, 17 juni 2017)

Pemberian pelatihan atau penyuluhan terhadap masyarakat memang memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan hidup khususnya masyarakat pesisir yang ada di lingkungan desa Bontosunggu. Masyarakat pesisir desa Bontosunggu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tapi kapasitasnya masih minim karena pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat pendahulunya, untuk itu di tuntut peran pemerintah agar bisa menambah pengetahuan mereka karena semakin kedepan semakin banyak tantangan seperti di era teknologi yang semakin canggih saat ini.

Senada dengan pendapat diatas, pendapat lain juga dipaparkan oleh SS selaku ketua kelompok nelayan bahwa :

“selama ini ketika hasil tangkapan kami banyak dan harganya murah kami tidak tahu harus menjual dimana lagi, dan kami juga tidak tahu mengolahnya menjadi apa, sehingga hasil tangkapan kami terkadang rusak karena terlalu lama kami simpan. dengan adanya pelatihan, pengetahuan kami semakin bertambah tentang bagaimana kami memanfaatkan hasil tangkapan kami”. (wawancara SS, 28 februari 2017)

Sedikit demi sedikit masyarakat pesisir bisa memperlihatkan perubahan yang signifikan akan kesadaran menjaga lingkungan lewat pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah. Pemberian pelatihan atau penyuluhan kepadamasyarakat adalah indikator penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya di kawasan pesisir desa Bontosunggu. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi,

peran pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

2. Pemberian bantuan (Modal)

Pengembangan aspek ekonomi penting untuk mengembangkan lapangan kerja berusaha serta meningkatkan pendapatan. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan seta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada, serta kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

Pemberian bantuan kepada masyarakat pesisir berjalan dengan optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat pesisir yang mendapat bantuan dari pemerintah, bantuan yang diberikan pemerintah bukan hanya dalam bentuk dana, tetapi juga dalam bentuk barang seperti perahu, alat tangkap, sarana dan prasarana guna membantu mereka dalam mempermudah pekerjaan mereka. Seperti yang dipaparkan oleh AB selaku pegawai dinas perikanan, bahwa :

“dengan adanya program ini, kami memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan baik berupa bantuan modal bagi kelompok-kelompok yang ada, kami juga memberikan bantuan berupa perahu, mesin, dan alat tangkap lainnya kepada nelayan, pembuatan jalan nelayan, rekomendasi untuk mendapatkan BBM di SPBU, STNK kapal, surat andon (izin melaut), serta rekomendasi penertiban kapal besar, karena dengan campur tangan dari pemerintah, masyarakat pesisir dapat memberdayakan dirinya”. (wawancara AB, 26 februari 2017).

Sehubungan dengan pendapat informan diatas dengan kondisi yang di temukan oleh peneliti di lapangan bahwa bantuan dari pemerintah adalah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat untuk merubah status mereka.

Senada dengan pendapat yang disampaikan diatas, muncul pendapat lain dari SB selaku kepala desa Bontosunggu, bahwa :

“pemberian bantuan kepada masyarakat dapat meningkatkan pemerdayaan dan kesejahteraan karena dengan bantuan modal tersebut masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik lagi”. (wawancara SB, 17 juni 2017)

Pemberian bantuan kepada masyarakat tentu harus sesuai dengan kondisi tentang bagaimana keadaan masyarakat yang harus mendapatkan bantuan agar bantuan tidak salah sasaran, hal ini Senada dengan apa yang disampaikan oleh SA selaku kaur keuangan, bahwa :

“pemberian bantuan kepada masyarakat harus tepat kepada mereka yang benar-benar tidak mampu”. (wawancara SA, 17 juni 2017).

Hal senada juga dikatakan oleh SL lewat pendapatnya, bahwa;

“Kami ingin kualitas hidup kami meningkat, kami harap pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan kami”. (wawancara SL, 17 juni 2017).

Inilah masyarakat pesisir yang ada di desa Bontosunggu, memang memiliki tuntutan yang besar dan bergantung kepada pemerintah dengan tujuan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi khususnya pada desa tempat mereka tinggal. Masyarakat membutuhkan modal untuk melangsungkan hidup mereka, tanpa bantuan dari pemerintah mereka tidak akan bisa berdaya.

3. Bantuan dana pendidikan

kualitas pendidikan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat pesisir menjadi halangan dalam setiap pelaksanaan program dari pemerintah terkhusus mengenai program pemberdayaan. Program pendidikan dari pemerintah yaitu

wajib belajar 9 tahun serta bantuan dana pendidikan akan membantu peningkatan angka pendidikan di desa Bontosunggu, hal ini menjadi kendala bagi pemerintah. Dengan dibiarkannya problem seperti ini anak-anak yang putus sekolah akan semakin bertambah. Kendala lain yang terlihat adalah ketidak sadaran dari orangtua tentang betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya, hal ini disebabkan karena memang sebagian dari mereka dulunya tidak mengenyam pendidikan. Mereka lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya karena tuntutan ekonomi, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh NN selaku tokoh pendidikan, bahwa :

“Banyak dari orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya, mereka lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka” (wawancara NN, 17 juni 2017)

Pendapat diatas menggambarkan betapa memprihatinkannya kondisi masyarakat pesisir desa Bontosunggu, mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya karena harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebenarnya sebagian dari mereka sadar akan betapa pentingnya pendidikan namun mereka terbatas pada kondisi ekonomi. Senada dengan apa yang disampaikan oleh HS, selaku kepala dusun tamasongo bahwa :

“Masyarakat sangat ingin menyekolahkan anaknya, tapi mereka lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan, ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan” (wawancara HS 17 juni 2017)

Menggratiskan biaya pendidikan adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah mengingat bahwa memang sekarang sudah ada program yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi melihat fakta yang terjadi dilapangan bahwa memang keberadaan program ini belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang ada di

desa Bontosunggu, entah apa yang terjadi dengan permasalahan yang seperti ini, hal ini menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat yang belum merasakan bantuan dana pendidikan tersebut.

b. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Bontosunggu

1. Sumber Daya Manusia

Pemberdayaan masyarakat adalah program yang sangat bermanfaat yang menjadi perhatian pemerintah khususnya pemberdayaan kepada masyarakat pesisir.

Kualitas sumber daya manusia mempengaruhi peningkatan kesadaran dan minat masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan dalam proses pengembangan daerahnya untuk menjadi tangguh, hal ini seperti apa yang disampaikan oleh PH selaku kepala BP3K bahwa :

“pemahaman mereka terhadap hal-hal baru sangat minim, hal ini dikarenakan pengetahuan yang mereka dapatkan berasal dari pengalaman-pengalaman mereka, seperti nelayan yang melihat kondisi cuaca dari tanda-tanda alam, sementara di sekarang ini gejala-gejala alam berubah-ubah seperti angin yang tiba-tiba bertiup kencang, kadang hujan ketika musim kemarau berlangsung, dan lain sebagainya” (wawancara PH, 26 februari 2017)

Masyarakat pesisir yang menjadi sasaran pemberdayaan umumnya tergolong masyarakat yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Dengan kondisi seperti ini, yang ada dibenak mereka hanya bagaimana mereka melangsungkan hidup, ini berarti mereka hanya memikirkan perut. Seperti apa yang diungkapkan oleh HB selaku pegawai dinas perikanan dan kelautan, bahwa :

“mereka cepat puas, sehingga mereka tidak tertarik dengan segala macam aturan, himbauan dan sebagainya sehingga mereka tidak peduli dengan program-program pemberdayaan pemerintah” (wawancara, HB 26 februari 2017).

Kondisi ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang terkekang dan kondisi alam yang menyebabkan psikologis masyarakat pesisir mudah puas dan kurang mementingkan masa depan. Akibatnya penggunaan bantuan tidak optimal. Kualitas sumber daya manusia di kawasan pesisir desa Bontosunggu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan masyarakat pesisir terbatas dari pengalaman atas apa yang pernah mereka lihat dan apa yang pernah mereka lakukan.

2. Peran Tengkulak (papalele) dan Rentenir

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir sebagai sasaran program umumnya masih terikat secara moral dalam tradisi yang ada sejak dulu, yaitu keterikatan dengan rentenir dan tengkulak. Tengkulak/rentenir sebagai pemilik modal memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada kliennya (masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya yang ada, walaupun sekaligus sebagai pengikat yang sulit untuk dilepaskan. Hubungan antara rentenir/tengkulak dengan masyarakat sebagai pelaku perikanan adalah hal yang tak bisa dipisahkan. Kebutuhan masyarakat dalam usaha perikanan yang dilakukannya dipenuhi oleh rentenir atau tengkulak. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PH selaku pegawai BP3K, bahwa :

“Hubungan antara papalele dan masyarakat adalah hal yang tak bisa dipisahkan, keduanya saling membutuhkan. Masyarakat sangat tergantung kepada papalele untuk melangsungkan aktivitasnya, sementara papalele sangat

membutuhkan pengasilan dari masyarakat untuk membayar kebutuhan yang telah diberikan kepada masyarakat”. (wawancara PH, 26 februari 2017)

Keterikatan masyarakat dengan rentenir/tengkulak seperti sebuah mata rantai yang sulit untuk diputus. Selain menjerat masyarakat, juga memberikan pandangan bagi mereka bahwa menerima dari apa yang dibutuhkan dari tengkulak/rentenir lebih mudah dan terjangkau dibanding mencari pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan yang bersifat formal seperti pegadaian atau bank dengan melalui banyak persyaratan. Seperti apa yang disampaikan oleh SS selaku anggota kelompok nelayan bahwa :

“kami mencari pinjaman pada pada tengkulak karena kami mudah mendapatkannya, kami membayarnya dengan hasil tangkapan yang kami dapat, sisa dari hasil tangkapan itulah yang kami ambil untuk memenuhi kebutuhan kami”. (wawancara SS, 17 juni 2017)

Masyarakat sebenarnya tahu betapa mencekiknya hubungan ini, namun mereka terpaksa melakukannya karena mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkannya. Mekanisme pembayarannya sangat mudah namun menyiksa masyarakat, mereka harus mendapat hasil untuk membayar hutang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat dipaksa untuk bekerja.

Selain keterikatan masyarakat dengan papalele/rentenir, pemerintah juga di hambat oleh pemikiran msyarakat yang menganggap bahwa bantuan jenis apapun yang diberikan adalah Cuma-Cuma dan tidak perlu dikembalikan. Budaya tradisional yang menganggap bahwa pemerintah wajib menyalurkan bantuan. Padahal tidak semua bantuan pemerintah bisa di gratiskan seperti bantuan modal seperti dana PEMP. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendekatan terhadap masyarakat.

Hal inilah yang harus diperbaiki oleh pemerintah yaitu dengan cara merubah pola pikir masyarakat mengenai bantuan-bantuan yang diprogramkan pemerintah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pesisir harus didukung oleh kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat dan memperlihatkan skala dan tingkat kelayakan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat di desa Bontosunggu kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar ialah dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana pentingnya pengetahuan untuk pemberdayaan demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemberian penyuluhan harus tepat sasaran, dalam hal ini peran balai penyuluh sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan peran aktif masyarakat agar mereka bisa memperbaiki kualitas hidup mereka. Bantuan modal dapat digunakan masyarakat untuk berusaha dengan mandiri tanpa keterikatan dengan pihak lain (tengkulak), pemenuhan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk pemberdayaan seperti akses pendidikan, bantuan alat tangkap, akses jalan, jaminan kesehatan dan sebagainya.

Kualitas sumber daya manusia di desa Bontosunggu dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang diakibatkan ketidak mampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka bisa menyekolahkan anaknya.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir sebagai sasaran program umumnya masih terikat secara moral dalam tradisi yang ada sejak dulu, yaitu keterikatan dengan rentenir dan tengkulak. Tengkulak/rentenir sebagai pemilik modal memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada kliennya (masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya yang ada, walaupun sekaligus sebagai pengikat yang sulit untuk dilepaskan. Hubungan antara rentenir/tengkulak dengan masyarakat sebagai pelaku perikanan adalah hal yang tak bisa dipisahkan. Keterikatan masyarakat dengan rentenir/tengkulak seperti sebuah mata rantai yang sulit untuk diputus. Selain menjerat masyarakat, juga memberikan pandangan bagi mereka bahwa menerima dari apa yang dibutuhkan dari tengkulak/rentenir lebih mudah dan terjangkau dibanding mencari pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan yang bersifat formal seperti pegadaian atau bank dengan melalui banyak persyaratan.

Keterikatan masyarakat dengan tengkulak adalah hubungan yang harus diputuskan oleh pemerintah, jika hal ini terus dibiarkan akan semakin membelit masyarakat. Masyarakat sudah mengalami ketergantungan kepada tengkulak dan rentenir karena perannya sebagai pemasok utama dalam sektor permodalan. Hal ini tentu jadi masalah yang sangat besar jika pemerintah ingin memberdayakan masyarakat. Selain keterikatan dengan tengkulak (papalele), ketergantungan masyarakat dengan rentenir adalah aspek pendukung dari terkendalanya kemajuan masyarakat, ini dikarenakan masyarakat harus membayar pinjaman dari rentenir setiap harinya. Masyarakat dibelit dengan bunga yang sangat besar, dengan sistem

pembayaran setia hari, jika ingin melunasinya harus membayar hutang pokoknya, tentu ini membutuhkan modal yang besar untuk melunasinya.

Aspek diatas adalah hal yang harus dibenahi agar masalah kemiskinan di desa Bontosunggu dapat dituntaskan demi tercapainya tujuan pemerintah menjadikan desa Bontosunggu sebagai daerah yang tangguh dan berkembang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam program, pengembangan desa pesisir tangguh di desa Bontosunggu sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kelautan) kabupaten takalar untuk lebih meningkatkan perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemberian modal, dan Bantuan dana pendidikan sehingga bisa memberdayakan masyarakat secara merata.
2. Adanya kendala dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya pemerintah daerah dan pemerinta desa mampu meningkatkan perannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan mampu memutus hubungan ketergantungan masyarakat kepada tengkulak dan rentenir
3. Kepada masyarakat agar meningkatkan pasrtisipasi dan memutus ketergantungan kepada tengkulak (papalele)/rentenir dan menghilangkan anggapan bahwa tengkulak dan rentenir sebagai pemasok modal utama

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, 2004. *Evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir*, Tesis S2 UGM Tahun 2004.
- Fukuyama F. *Sosial Capital, Civil Society, and Development* : Third World Quarterly
- Hafid, E., 2006. *Potret Kelautan di Masa Kini*. Artikel Ilmiah Majalah Tanah Air Walhi Nomor 3 Tahun XXI.
- Handoko TH. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imami, D, Amiruddin, A., 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. SinarGrafika: Jakarta
- Kartasasmita, G., 1996. *Pembrdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas
- Ketaren, 2003. *Minyak dan Lemak Pangan*. UI Press. Jakarta.
- Kusnadi, 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu*. Jember : Graha Ilmu
- Mulyarto, Tjokrowinoto. 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta : KreasiWacana.
- Ndraha, Taliziduhu, 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, B.W. Dadang, Prijono, D., *Bahan Pelatihan Pengembangan dan Pemanfaatan insektisid aAlami*: Bogor. 9-13 Agustus 1999. Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu Institut Pertanian Bogor. Bogor, 1-7.
- Nugroho, Iwan, danRokhminDahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah (perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan)*. LP3ES, Jakarta.
- Prijono, OS, Pranarka A,M,W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implemetasi*. CSIS : Jakarta.

Rijanta R, Hizbaron D.R, Baiquni M., 2014. *Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana*. Jogjakarta : Gadjah Mada University press.

Sugianto,2005. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup(Tantangan Pembangunan di Indonesia Timur)*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: RefikaAditama.

Umar, H., 2006. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*. London: Grower Publishing Company.



RIWAYAT HIDUP



Asrul lahir di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar pada tanggal 05Maret 1994, merupakan anak ke 5 dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan Bapak Sainuddin dan Ibu Saming. Penulis hidup Di Indonesia dan beragama islam, adapun riwayat pendidikan penulis, penulis menempuh pendidikan di SDN No. 96 Kalongkong pada Tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006, kemudian terdaftar sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Muhammadiyah Mandalle pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Galesong Utara pada tahun 2008 dan tamat tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan Studi di tahun 2017 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar “